
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
DAK FISIK TA. 2024

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	: Jawa Tengah
Jenis/Tematik DAK Fisik	: Reguler
Bidang DAK Fisik	: Pendidikan
Subbidang DAK (jika ada)	: Perpustakaan Daerah
Menu Kegiatan	: Perluasan Gedung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Instansi Pelaksana	: Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional yang hendak dicapai bangsa Indonesia antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu parameter untuk mengukur kecerdasan bangsa adalah tingkat literasi masyarakat. Peningkatan literasi masyarakat sebagai salah satu program prioritas. Ditegaskan oleh Bappenas bahwa pendidikan dan literasi di satu pihak serta pembangunan sosial-ekonomi, dan kesejahteraan di pihak lain adalah variabel yang saling berpengaruh untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Keduanya merupakan bagian dari pembangunan manusia yang dapat membuka jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat. Karena itu, pemerintah terus meneguhkan komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan manusia dan menempatkan pendidikan serta sektor sosial-budaya, termasuk literasi, pada posisi sentral dalam kebijakan dan program pembangunan nasional. Pernyataan UNDP melalui Education for All Global Monitoring Report semakin meneguhkan langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut. Disebutkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia melalui literasi.

Dalam konteks tersebut, institusi perpustakaan mempunyai kewajiban untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Pada konsiderans Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan ditegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. Strategisnya peran institusi perpustakaan dalam peningkatan

literasi masyarakat juga dikemukakan oleh UNESCO, bahwa *libraries provide literacy resources for children, youth and adults at all proficiency levels, thereby making an enormous contribution to supporting a reading culture and the creation of a literate society* (perpustakaan menyediakan sumber daya literasi untuk anak-anak, remaja dan orang dewasa di semua tingkat kemahiran, sehingga memberikan kontribusi yang sangat besar untuk mendukung budaya membaca dan penciptaan masyarakat yang literate).

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/ Kota sedang memacu diri untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan di semua sektor kehidupan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki sejarah panjang dalam hal pendirian. Resmi berdiri pada tanggal 1 Agustus 1951 dengan nama Perpustakaan Negara Semarang. Pendirian perpustakaan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri P. P. dan K Republik Indonesia No. 18165/Keb tertanggal 23 Juli 1951. Perpustakaan Negara Semarang adalah perpustakaan negara kedua di Indonesia setelah Perpustakaan Negara Yogyakarta. Lokasi pendirian Perpustakaan Negeri Semarang adalah di Gedung Openbare Leeszaal Bibliothek, Jalan Bojong (sekarang Jalan Pemuda No. 147 Semarang). Nama Perpustakaan Negeri Semarang diganti menjadi Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah dengan status Perpustakaan Wilayah Tipe A. Penggantian nama ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 01990/1978 tanggal 23 Juni 1978. Perwil Propinsi Jawa Tengah pindah tempat secara resmi ke Jalan Sriwijaya No. 29 A (lokasi sekarang ini) pada tanggal 20 Maret 1987. Kemudian, berdasarkan Keputusan Republik Indonesia No. 11 tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional, Perwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan status menjadi Perpustakaan Daerah yang menjadi bagian dari satuan Organisasi Perpustakaan Nasional tingkat daerah. Keputusan Presiden No. 50 tahun 1997 tanggal 29 Desember 1997 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menetapkan bahwa Perpustakaan Daerah menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi yang merupakan instansi vertikal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. Keppres ini juga menetapkan bahwa Perpusda dipimpin oleh Kepala Perpustakaan Nasional Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi pedoman keluarnya Peraturan Daerah No. 9 tahun 2001, tanggal 29 Juni 2001, tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi kantor di lingkungan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perpustakaan Nasional Provinsi Jawa Tengah dirubah namanya menjadi Perpustakaan Daerah

Provinsi Jawa Tengah. UU No. 22/1999 juga menetapkan bahwa Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan kantor yang bertugas pokok membantu Gubernur menjalankan Pemerintahan Daerah dalam bidang perpustakaan. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menetapkan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Peraturan Daerah No. 7 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi menetapkan penggabungan Badan Arsip dengan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan sebutan baru Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 54 tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pembentukan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan bahwa Perpustakaan merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tanggal 27 Desember 2016 menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, kemudian terjadi perombakan kembali. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 5 Bidang dan 1 Sekretariat. Bidang yang mengurus urusan perpustakaan sendiri terdiri dari 2 Bidang yakni Bidang Pengelolaan Perpustakaan yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 29A Kota Semarang, dan Bidang Pengembangan Perpustakaan yang beralamat di Jl. Dr. Setiabudi No.201C Srandol Kulon Kota Semarang, masih satu kompleks dengan 3 Bidang lain dan Sekretariat.

Sejak kepindahan ke Jalan Sriwijaya No. 29A pada tahun 1987 hingga saat ini belum pernah dilakukan perombakan dan perawatan yang berarti sehingga seolah-olah gedung perpustakaan terlihat kuno dan tidak representatif. Hal ini menjadi salah satu kendala yang menghambat terwujudnya rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan sesuai dengan visi Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian harus diakui bahwa perkembangan hasil pembangunan di daerah ini belum seperti yang diharapkan. Salah satu parameter untuk melihat kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan ukuran perbandingan antara harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup masyarakat Provinsi Jawa Tengah, seperti dalam tabel berikut .

Tabel 1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin tahun 2020-2022

Kabupaten / Kota	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PROV. JAWA TENGAH	8,16	8,17	8,31	7,24	7,34	7,55
Kab. Cilacap	7,46	7,47	7,66	6,49	6,76	6,77
Kab. Banyumas	7,97	7,98	8,03	7,24	7,35	7,53
Kab. Purbalingga	7,48	7,49	7,57	6,87	6,95	7,09
Kab. Banjarnegara	6,90	6,93	7,12	6,57	6,58	6,59
Kab. Kebumen	7,98	7,99	8,22	7,10	7,11	7,42
Kab. Purworejo	8,85	8,86	8,87	7,70	7,89	8,00
Kab. Wonosobo	7,02	7,03	7,13	6,61	6,62	6,63
Kab. Magelang	8,31	8,32	8,34	7,29	7,30	7,32
Kab. Boyolali	8,64	8,65	8,68	7,25	7,26	7,51
Kab. Klaten	9,17	9,35	9,60	8,07	8,33	8,62
Kab. Sukoharjo	9,96	9,97	10,09	8,87	8,88	9,17
Kab. Wonogiri	7,92	7,93	7,94	6,80	6,81	7,05
Kab. Karanganyar	9,33	9,34	9,36	8,02	8,07	8,36
Kab. Sragen	8,41	8,42	8,43	6,93	6,97	7,27
Kab. Grobogan	7,36	7,64	7,78	6,50	6,51	6,76
Kab. Blora	7,40	7,41	7,43	6,30	6,58	6,60
Kab. Rembang	7,72	7,86	7,88	6,68	6,82	6,94
Kab. Pati	8,04	8,05	8,31	6,91	7,13	7,49
Kab. Kudus	9,38	9,39	9,40	8,18	8,27	8,59
Kab. Jepara	8,08	8,18	8,47	7,12	7,37	7,69
Kab. Demak	8,28	8,31	8,51	7,22	7,42	7,69
Kab. Semarang	8,45	8,46	8,48	7,63	7,75	7,76
Kab. Temanggung	7,53	7,54	7,56	7,01	7,02	7,28
Kab. Kendal	8,10	8,11	8,12	6,84	6,89	7,16
Kab. Batang	7,43	7,44	7,55	6,53	6,54	6,55
Kab. Pekalongan	7,28	7,53	7,78	6,57	6,85	7,14
Kab. Pemasang	6,95	6,96	7,01	5,94	6,10	6,15
Kab. Tegal	7,60	7,61	7,71	6,32	6,48	6,79
Kab. Brebes	6,77	6,78	6,88	5,45	5,55	5,83
Kota Magelang	11,11	11,32	11,42	10,16	10,42	10,75
Kota Surakarta	11,25	11,42	11,44	10,30	10,54	10,56
Kota Salatiga	11,00	11,19	11,47	10,06	10,32	10,64
Kota Semarang	11,42	11,51	11,53	10,16	10,44	10,46
Kota Pekalongan	9,06	9,28	9,45	8,78	8,97	8,98
Kota Tegal	8,88	9,06	9,31	8,02	8,28	8,57

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/indicator/40/134/1/rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-jenis-kelamin.html>

Indikator Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan Indikator kesejahteraan penduduk yang juga memengaruhi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process enlarging the choices of people*). Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (United Nation Development Programme-UNDP).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1. Angka Harapan Hidup saat Lahir - *Life Expectancy*

Angka Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

2. Harapan Lama Sekolah - *Expected Years of Schooling (EYS)*

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

3. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan - *Purchasing power parity (PPP)*

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah tahun 2022 mencapai 72,79 naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 72,16. Peningkatan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Peningkatan IPM Jawa Tengah tahun 2022 pada semua komponen penyusunnya. Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita naik 3,11 persen dibanding tahun 2021. Di sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan hidup hingga 74,57 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Berawal dari kondisi tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bermaksud meningkatkan layanan pendidikan melalui upaya peningkatan minat baca dengan cara penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai dan representatif. Keberadaan gedung perpustakaan yang sesuai standar pelayanan perpustakaan mutlak dibutuhkan jika ingin dapat memberikan layanan perpustakaan yang memuaskan. Perlu diketahui bahwa desain gedung perpustakaan berbeda dengan gedung kantor lainnya. Gedung perpustakaan adalah prasarana pelayanan publik terkait kegiatan literasi.

Saat ini kegiatan literasi tidak melulu tentang membaca buku namun kegiatan terkait fasilitas menulis bagi pemustaka, kegiatan bermain yang bersifat edukatif dan kegiatan yang mensyaratkan sarana audiovisual juga termasuk bidang literasi. Sebuah perpustakaan yang baik tentunya dapat memberikan dampak serta manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Perpustakaan saat ini telah bertransformasi menjadi sebuah tempat belajar dan berkegiatan masyarakat. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut maka perpustakaan harus dapat menyediakan ruang-ruang yang sesuai dengan jenis kegiatan, fungsi dan hasil yang ingin diraih dari terselenggaranya kegiatan literasi publik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud:

- Salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan literasi masyarakat dengan keberadaan perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan informasi yang semakin beragam.
- Meningkatkan apresiasi masyarakat Jawa Tengah terhadap keberadaan sebuah perpustakaan.
- Meningkatkan wawasan dan kesejahteraan serta kualitas masyarakat Jawa Tengah melalui peningkatan minat dan kebiasaan membaca.

Tujuan:

- Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan yang representatif, nyaman, dan berorientasi pada teknologi informasi serta memenuhi kepuasan pemustaka.
- Tercukupinya kebutuhan ruang yang sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya.
- Terselenggaranya kegiatan literasi yang masih belum dapat diadakan secara maksimal terkait keterbatasan tempat.

C. Output dan Outcome

No.	Rincian Menu Kegiatan	Jumlah Penerima	Target Output	Target Outcome
1	Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	116.039 pemustaka	1 paket	Meningkatnya Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Jawa tengah dari atau meningkatnya IPM dari 72,79 menjadi 74,00

D. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah seluruh masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan para pemustaka Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah serta karyawan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Pada khususnya.

E. Indikasi Kebutuhan Dana dan Lokasi Kegiatan

No	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya (Rp)	Usulan Kebutuhan Dana (Rp)	Lokus
1.	Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	1 unit gedung	4.499.532.000	4.499.532.000	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

F. Dukungan APBD Non DAK

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan lahan/ tanah milik Pemerintah yang sudah bersertifikat sebagai lokasi pembangunan gedung fasilitas layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Non DAK sebagai dana pendamping perluasan gedung layanan perpustakaan sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).

G. Organisasi / Instansi Pelaksana

Pelaksana kegiatan adalah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

H. Metode Pelaksanaan dan Rencana Penyaluran

Metode pelaksanaan pembangunan gedung fasilitas layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode penyedia.
Tahapan Kegiatan sebagaimana terlampir.

I. Pemantauan dan Evaluasi

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah serta pihak terkait melakukan pemantauan selama pelaksanaan kegiatan berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan bagian demi bagian konstruksi maupun jadwal penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan dan melakukan evaluasi bila mana terjadi penyimpangan dalam kesepakatan kontrak. Selama proses pemantauan dan evaluasi petugas mencatat hal-hal yang terjadi selama kegiatan pekerjaan.

J. Keterangan Lainnya

-

Semarang, Mei 2023

Pt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris,



SAPTA HERMAWATI, SH. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650906 198603 2 009